

## ABSTRAKSI

Saat ini, di Indonesia banyak terjadi kepunahan fauna dan flora. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut dan masih banyaknya perburuan liar yang di perjualbelikan melalui media sosial. Pengaturan terhadap sanksi pidana terhadap kejahatan penjualan satwa liar yang dilindungi terlalu ringan sehingga masih banyak terjadi peningkatan kasus penjualan satwa liar yang dilindungi.

Pengaturan kasus jual beli satwa liar yang dilindungi melalui media sosial sangat berkaitan dengan ketentuan undang-undang lainnya seperti Undang-undang Perdagangan, Undang-undang Kepabeanan. Namun, masih banyak Hakim yang memutuskan sanksi dari kasus jual beli satwa liar yang dilindungi hanya mengacu pada aturan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan undang-undang lain tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana pada perkara jual beli satwa liar yang dilindungi sehingga akan membuat efek jera pada pelaku.

Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis karakteristik tindak pidana jual beli satwa liar yang dilindungi melalui media sosial dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli satwa liar yang dilindungi melalui media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif serta pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

**Kata kunci :** Pidana, Pelaku, Satwa Liar yang dilindungi, Media Sosial.